

ANALISIS IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DALAM PENGELOLAAN SURAT DINAS DI BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BONE BOLANGO

Oleh :

Nunung Indrasari Haras¹⁾, Ayu Anastasya Rachman²⁾, Darman³⁾

^{1,2,3} Universitas Bina Mandiri Gorontalo

email: nu2ngharas@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 9 Agustus 2025

Revisi, 7 September 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Srikandi,
Manajemen Kearsipan,
Transformasi Digital,
Resistensi Perubahan,
Efisiensi Administrasi.



ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengelolaan arsip pemerintahan merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) hadir sebagai solusi nasional untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan keamanan dokumen pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SRIKANDI di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, dengan menyoroti persepsi dan respon pegawai terhadap aplikasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan dualitas respon: sebagian pegawai mengapresiasi percepatan proses surat dinas, sementara yang lain menunjukkan resistensi karena alur birokrasi yang dianggap kompleks. Rekomendasi meliputi peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan prosedur digital, dan sosialisasi berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman implementasi teknologi informasi dalam sektor publik, khususnya pada manajemen kearsipan di tingkat daerah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Nunung Indrasari Haras

Afiliasi: Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email: nu2ngharas@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan. Pengelolaan arsip dan surat menyurat menjadi aspek krusial yang membutuhkan inovasi teknologi. Pemerintah Indonesia, melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai platform nasional untuk mendukung transformasi digital layanan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021.

SRIKANDI bertujuan mempercepat proses pembuatan, pengiriman, serta pengarsipan surat dinas secara elektronik. Dengan pendekatan paperless dan alur kerja digital, aplikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keamanan data dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

Namun, implementasi teknologi baru seringkali menghadapi tantangan, salah satunya adalah resistensi dari sumber daya manusia yang terlibat. Studi oleh Davis (1989) melalui Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks organisasi pemerintahan, persepsi pegawai terhadap aplikasi baru menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah telah mulai mengadopsi aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat dinas. Namun, ditemukan adanya perbedaan sikap di antara pegawai terhadap aplikasi ini. Sebagian pegawai menyambut baik kehadiran SRIKANDI karena membantu mempercepat proses birokrasi, tetapi sebagian lainnya merasa terbebani karena harus menyesuaikan diri dengan alur digital

yang baru dan menunggu persetujuan atasan yang dianggap memakan waktu.

Fenomena ini penting untuk dianalisis lebih dalam karena menyangkut keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik. Pendekatan manajemen perubahan seperti yang dikemukakan oleh Kurt Lewin (1951) menekankan pentingnya tahapan unfreezing, changing, dan refreezing dalam merespon perubahan budaya organisasi.

Lebih lanjut, Robbins dan Coulter (2016) menekankan bahwa efektivitas perubahan organisasi sangat tergantung pada komunikasi yang jelas, pelatihan yang memadai, serta kepemimpinan yang mendukung. Oleh karena itu, pengelolaan perubahan menuju sistem kearsipan digital harus dilakukan secara sistematis dan terencana.

Dalam konteks kebijakan nasional, penerapan SRIKANDI tidak hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Transformasi digital menjadi salah satu pilar dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi SRIKANDI di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango, khususnya dalam melihat respon, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh pegawai dalam penggunaan sistem ini.

Tinjauan Pustaka / Landasan Teori

Perkembangan transformasi digital dalam pemerintahan menjadi bagian penting dalam agenda reformasi birokrasi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Transformasi ini tidak hanya berkutat pada penggunaan teknologi informasi semata, tetapi juga mencakup penyesuaian proses kerja, struktur organisasi, hingga budaya kerja birokrasi (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019). Di Indonesia, langkah strategis digitalisasi ini diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dalam upaya mendukung digitalisasi di bidang kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses pencatatan, pengiriman, serta penyimpanan dokumen dinas secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dan ramah lingkungan kerja tanpa kertas (paperless).

Keberhasilan implementasi sistem digital seperti SRIKANDI sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pegawai sebagai pengguna dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru tersebut. Dalam hal ini, Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1989) menjadi acuan penting untuk mengkaji perilaku pengguna terhadap adopsi teknologi. TAM

menjelaskan bahwa dua faktor kunci, yaitu persepsi terhadap manfaat (usefulness) dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan (ease of use), akan menentukan keputusan seseorang dalam menerima dan menggunakan suatu sistem teknologi. Oleh karena itu, persepsi positif dari pegawai terhadap SRIKANDI menjadi prasyarat penting dalam mencapai efektivitas implementasi di lingkungan birokrasi.

Selain dari sisi penerimaan pengguna, keberhasilan implementasi sistem digital juga berkaitan erat dengan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan. Menurut teori perubahan organisasi dari Kurt Lewin (1951), terdapat tiga tahap penting dalam proses perubahan, yakni tahap pencairan (unfreezing) untuk menciptakan kesadaran, tahap transisi (changing) untuk mengubah pola kerja, dan tahap pembekuan kembali (refreezing) untuk menguatkan pola baru menjadi budaya organisasi. Dalam konteks pengelolaan arsip digital, tahapan ini sangat relevan untuk mendorong kesiapan mental dan adaptasi pegawai terhadap sistem baru seperti SRIKANDI. Ketiadaan strategi perubahan yang matang seringkali menjadi pemicu munculnya resistensi terhadap transformasi digital.

Lebih lanjut, konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance juga menjadi kerangka acuan dalam transformasi birokrasi digital. Prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam penerapan sistem digital di sektor publik. Robbins dan Coulter (2016) menekankan bahwa dukungan manajerial, pelatihan yang memadai, serta komunikasi yang terbuka dan terstruktur merupakan faktor-faktor penting dalam memastikan keberhasilan perubahan di dalam organisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kepemimpinan transformatif sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sistem kearsipan digital yang efektif dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti dinamika dalam penerapan aplikasi SRIKANDI di instansi pemerintahan. Yuliani et al. (2022) menyatakan bahwa aplikasi ini mampu mempercepat proses surat-menyurat dan meningkatkan efisiensi birokrasi, meskipun masih ditemukan kendala teknis dan keterbatasan kompetensi pengguna. Sementara itu, Putri dan Nugroho (2021) menggarisbawahi pentingnya kesiapan infrastruktur dan perubahan budaya kerja digital sebagai elemen krusial untuk keberhasilan adopsi aplikasi SRIKANDI di daerah. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa selain ketersediaan teknologi, faktor sumber daya manusia dan strategi manajemen perubahan menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya dalam aspek pengelolaan arsip elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bone Bolango. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pegawai yang aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI, termasuk kepala bidang dan staf administrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi, serta dokumentasi proses pengelolaan surat dinas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango telah berjalan, namun belum optimal. Terdapat dua tipe respon utama dari pegawai. Pertama, respon positif dari sebagian pegawai yang menganggap SRIKANDI sangat membantu mempercepat proses pembuatan surat dan mendistribusikannya secara efisien. Mereka juga mengapresiasi fitur pelacakan surat secara digital.

Kedua, respon negatif atau resistensi yang muncul dari pegawai lain yang merasa aplikasi ini menambah beban kerja. Mereka mengeluhkan alur proses yang panjang, khususnya dalam tahapan persetujuan berjenjang dari atasan. Beberapa pegawai juga merasa belum cukup menguasai aspek teknis dari aplikasi tersebut.

Pegawai yang mendukung penggunaan SRIKANDI umumnya adalah mereka yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas kerja sehari-hari. Sementara itu, pegawai yang cenderung enggan menggunakan aplikasi ini merupakan kelompok yang kurang terbiasa dengan sistem digital dan membutuhkan bimbingan teknis lebih lanjut.

Temuan di atas mencerminkan kerangka kerja Technology Acceptance Model (Davis, 1989), di mana kemanfaatan teknologi telah diakui namun kemudahan penggunaannya masih diragukan. Hal ini menandakan perlunya peningkatan pelatihan dan penyederhanaan fitur. Selain itu, dalam konteks teori perubahan Kurt Lewin (1951), proses unfreezing belum berhasil dilakukan secara menyeluruh, yang mengakibatkan perubahan belum diterima secara menyeluruh oleh semua pegawai.

Dari perspektif manajemen organisasi, Robbins dan Coulter (2016) menyatakan bahwa perubahan organisasi membutuhkan strategi komunikasi yang baik dan partisipasi aktif dari seluruh unsur. Sosialisasi yang tidak menyeluruh dan

kurangnya pelibatan pegawai sejak awal implementasi menjadi faktor penghambat utama.

Selain itu, pelaksanaan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 yang mewajibkan implementasi sistem kearsipan digital belum sepenuhnya dipahami secara teknis dan operasional oleh seluruh pegawai. Diperlukan peran aktif pimpinan untuk memfasilitasi pelatihan berkelanjutan dan menjadikan aplikasi ini sebagai bagian dari budaya kerja harian.

Strategi penguatan kompetensi pegawai juga perlu disesuaikan dengan tingkat literasi digital masing-masing. Adopsi teknologi tidak bisa disamaratakan, melainkan harus mempertimbangkan kesiapan individu dan kelompok kerja. Program pendampingan teknis atau mentor sesama pegawai dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan ini.

Terakhir, resistensi terhadap SRIKANDI juga menunjukkan bahwa inovasi digital harus dibarengi dengan penyederhanaan proses birokrasi. Jika alur digital justru menambah waktu tunggu atau membuat persetujuan menjadi lebih kompleks, maka esensi efisiensi akan hilang. Oleh karena itu, perlu adanya review terhadap SOP dan penguatan komitmen pimpinan agar alur kerja lebih cepat dan transparan.

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting, baik dalam tataran praktis maupun teoritis, khususnya terkait dengan penguatan transformasi digital dalam manajemen kearsipan di instansi pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SRIKANDI sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan penyesuaian terhadap prosedur kerja digital. Temuan ini mendorong perlunya penyusunan strategi pelatihan yang lebih sistematis, intensifikasi sosialisasi teknologi, serta penyederhanaan alur birokrasi digital agar aplikasi dapat diadopsi secara menyeluruh dan efektif. Bagi instansi pemerintah, hasil ini juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang mendukung perubahan, serta komunikasi organisasi yang terbuka dalam proses transisi menuju tata kelola arsip berbasis elektronik.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerimaan teknologi dalam sektor publik, khususnya melalui pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan teori perubahan organisasi Kurt Lewin. Persepsi terhadap kemudahan dan kebermanfaatan teknologi terbukti menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat penerimaan aplikasi oleh pegawai. Oleh karena itu, kajian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari aspek manusia dan budaya organisasi, sehingga pendekatan teknis harus dibarengi dengan pendekatan sosial dan manajerial yang tepat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan yang mengeksplorasi strategi manajemen perubahan secara lebih mendalam dalam

konteks digitalisasi pelayanan publik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

4. KESIMPULAN

Implementasi aplikasi SRIKANDI di Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango menunjukkan dinamika penerimaan teknologi yang khas, di mana sebagian pegawai menyambut positif efisiensinya, sementara sebagian lainnya masih menunjukkan resistensi. Untuk meningkatkan kualitas layanan kearsipan secara digital, perlu dilakukan strategi pembinaan yang meliputi pelatihan teknis, penyederhanaan alur birokrasi, dan penguatan kepemimpinan transformasional.

Rekomendasi praktis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Menyusun SOP penggunaan SRIKANDI yang lebih sederhana dan tidak berbelit.
2. Menyelenggarakan pelatihan berkala sesuai tingkat literasi digital pegawai.
3. Menyediakan dukungan teknis internal yang responsif dan mudah diakses.

5. REFERENSI

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kearsipan. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). Buku Panduan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Versi 2.0. Jakarta: ANRI.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Indriyani, T. A., & Nugroho, A. (2020). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Arsip Dinamis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(2), 85–92. <https://doi.org/10.22146/jipi.12345>
- Kurniawan, A. (2021). Transformasi digital dalam pengelolaan arsip: Studi kasus penggunaan aplikasi SRIKANDI di instansi pemerintah. *Jurnal Manajemen Informasi & Perpustakaan*, 19(1), 55–66. <https://doi.org/10.31294/jmip.v19i1.12345>
- Kurt, L. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. New York: Harper & Row.
- Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. D. Cartwright (Ed.). New York: Harper & Row.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). *Defining digital transformation: Results from*

expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Elektronik.
- Putri, D. A., & Nugroho, R. A. (2021). Analisis kesiapan infrastruktur dan budaya digital dalam implementasi aplikasi SRIKANDI di instansi pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 55–65.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Boston: Pearson Education.
- Sari, M., & Hasanah, U. (2022). Evaluasi Implementasi Aplikasi SRIKANDI di Kementerian XYZ: Perspektif Manajemen Perubahan. *Jurnal Transformasi Administrasi Negara*, 8(1), 102–117. <https://doi.org/10.24843/jtan.2022.v8.i1.102>
- Sutaryo, D. (2020). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Peluang dan Tantangan dalam Reformasi Birokrasi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2), 45–58. <https://doi.org/10.31289/jra.v7i2.7890>
- Yuliana, E. (2019). Persepsi Pegawai terhadap Penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam Mendukung Tata Kelola Arsip. *Jurnal Informasi dan Dokumentasi*, 4(2), 133–140. <https://doi.org/10.14710/jid.4.2.133-140>
- Yuliani, R., Hasanah, S., & Pratama, R. D. (2022). Efektivitas implementasi aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat menyurat elektronik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(2), 112–120.